



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT

**LAPORAN HASIL REVIU LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) KOTA SAMARINDA
TAHUN 2023**

IRBAN : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH KHUSUS
NOMOR : 700.1.2.1/436/200
TANGGAL : 25 MARET 2024

**TAHUN PENGAWASAN
2024**



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Dahlia No.09 Telp. (0541) 741270 Fax.(0541) 741003
S A M A R I N D A

Penyelenggaraan Pengawasan yang Profesional Menuju Pemerintahan yang Baik

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Samarinda untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Samarinda.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Samarinda, 25 Maret 2024
INSPEKTUR

Mas Andi Suprianto, SE
Pembina Tk.I
NIP. 19640531 198603 1 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jalan Dahlia No. 9 RT. 04 Telp/Fax : (0541) 741003 Kel. Bugis
Email : inspektoratkotasmd@gmail.com

S A M A R I N D A

Terwujudnya Pengawasan Internal yang Profesional menuju Tata Kelola Pemerintah yang baik

Nomor : 700.1.2.1/436 /200
Lampiran : 1 berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Kota Samarinda Tahun
2023

Samarinda, 25 Maret 2024

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Kota Samarinda**
di

Samarinda

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Walikota pada lambat 2 (dua) setelah setelah Tahun Anggaran berakhir dan Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan disampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendahayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Sesuai Pedoman Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendahayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, Reviu dilakukan hanya atas Laporan Kinerja tingkat K/L/Pemda saja.
3. Pelaksanaan Reviu dilaksanakan oleh Tim reviu berdasarkan pada Surat Tugas Inspektur Kota Samarinda Nomor 800.1.11.1/387/200 tanggal 5 Maret 2024 tentang Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Samarinda Tahun 2023.
4. Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah Kota Samarinda tahun 2023.

II. DASAR REVIU

1. Peraturan Menteri Pendahayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.8.6.3/078/13.02 tanggal 4 Maret 2024 perihal Reviu Laporan Kinerja tahun 2023
3. Surat Tugas Inspektur Kota Samarinda Nomor Nomor 800.1.11.1/342/200 tanggal 14 Maret 2023 tentang Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Samarinda Tahun 2023;

III. TUJUAN REVIU

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2023.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2023.

V. METODOLOGI REVIU

1. Reviu LKjIP Kota Samarinda Tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendahayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen pendukung dalam perumusan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Samarinda Tahun 2023;

VI. GAMBARAN UMUM

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Pelaporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Walikota pada lambat 2 (dua) setelah setelah Tahun Anggaran berakhir dan Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan disampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendahayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Samarinda yang berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Walikota Samarinda Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Samarinda Tahun 2023 disusun dengan mengikuti sistematika dan struktur bab, sebagai berikut:

No	BAB	KETERANGAN	ISI
1	BAB I	Pendahuluan	Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
2	BAB II	Perencanaan Kinerja	Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
3	BAB III	Akuntabilitas Kinerja	A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

No	BAB	KETERANGAN	ISI
			dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional; 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
4	BAB IV	Penutup	Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

VII. URAIAN HASIL REVIU

A. Pengujian Atas Kesesuaian Format

penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Samarinda telah menggunakan format laporan kinerja sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan rincian sebagai berikut :

1. Laporan kinerja telah menyajikan data tabel dan data gambar, namun masih terdapat ketidak sesuaian data tabel dan gambar dengan isi laporan (Lampiran.1)
2. Pada bab II halaman 6 Aspek strategis kota samarinda, luas wilayah Kota Samarinda dan batas wilayah belum sesuai dengan data luas wilayah pada RPJMD maupun data BPS
3. Pada bab II halaman 7 tabel 1 dan penjelasan data Jumlah penduduk Kota Samarinda, data yang disajikan masih data tahun 2022, sedangkan BPS "samarinda dalam angka" telah merilis data untuk tahun 2023 sehingga

perlu dilakukan penyesuaian sesuai data tahun 2023 data sensus penduduk sebanyak 861.878 jiwa

4. Pada bab II halaman 13 data pegawai Kota Samarinda yang disajikan adalah data tahun 2022, dan penjelasan tabel seharusnya adalah tabel 2
5. Pada bab II halaman 21, judul isu strategis ke 10 penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar terkait lingkungan perlu disesuaikan sesuai dengan RPJMD.
6. Pada bab III halaman 34, tabel 3 penyajian disempurnakan agar lebih rapi
7. Pada bab III halaman 37, 10 program unggulan penyajian disempurnakan agar lebih rapi
8. pada bab III halaman 39, Terdapat ketidaksempurnaan penulisan sasaran pada Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah halaman 39 tabel 4 dengan RPJMD yaitu pada sasaran meningkatkan aksesibilitas inter dan antar wilayah kota, pada PK dan Laporan kinerja tersaji kata "Antas".
9. Pada bab III Hasil capaian sasaran strategis tahun 2022 pada tabel 5 sasaran 13 pada halaman 44 meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat dengan kategori cukup seharusnya menjadi kategori Baik sehingga jumlah kategori baik adalah 15.
10. Pada bab III halaman 57 tabel 10 data IPM berdasarkan jenis kelamin masih menggunakan tahun 2021, penjelasan pada halaman 58 masih menyajikan tahun 2021 dan belum terdapat penjelasan bahwa data yang digunakan adalah data tahun 2022.
11. Pada bab III tabel 12 yang disajikan pada halaman 63 adalah data tahun 2023, namun realisasi capaian kinerja yang disajikan pada halaman 67 masih menggunakan data tahun 2022
12. Pada bab III halaman 65, terdapat penjelasan target kinerja 10.000, bisa ditambahkan data capaian sampai dengan tahun 2023 telah tercapai berapa beserta jenis klasifikasi usaha
13. Pada bab III halaman 70, data yang disajikan belum sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah kota Samarinda dan data Badan Pendapatan Daerah, serta belum terdapat formulasi perhitungan.
14. Pada bab III halaman 78 penyajian penulisan indeks pelayanan publik disesuaikan.

15. Pada bab III halaman 87 rasio aksesibilitas antar wilayah kota, luas wilayah yang disajikan belum sesuai dengan luas wilayah sesuai data RPJMD dan BPS.
16. Pada bab III halaman 88, data tabel rasio aksesibilitas antar wilayah kota, data tabel tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 belum sesuai dengan data RPJMD, sehingga rasio juga harus dihitung kembali kebenaran angkanya untuk mengetahui nilai realisasi pada indikator sasaran 15.
17. Pada bab III halaman 89. formulasi jumlah sarana prasarana sistem transportasi perlu dihitung kembali.
18. Pada bab III halaman 92 luasan kota samarinda belum sesuai dengan data RPJMD sehingga perlu dilakukan penyesuaian perhitungan kembali untuk mengetahui persentase RTH kota Samarinda
19. Pada bab III halaman 94 persentase permukiman tertata, luas permukiman tertata tersaji 761,89 Ha, sedangkan penjelasan total jumlah 123 perumahan luasnya adalah 2.761,89 Ha.
20. Pada bab III halaman 95 Indeks kualitas lingkungan Hidup penjelasan target dan realisasi terbalik yaitu 58,76 dan 59,9
21. Pada bab III halaman 98 penyajian tabel nilai IKD dan IRB agar dirapikan
22. Pada bab III halaman 102, data pada perkembangan PAD kota Samarinda tahun 2023 belum sesuai dengan data laporan keuangan Pemerintah Kota Samarinda sebesar Rp.858.259.042.911,93
23. Pada bab III halaman 102, data pendapatan transfer tahun 2022 dan 2023 jenis pendapatan transfer dana perimbangan dan pendapatan transfer dana intensif daerah (DID) belum sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda
24. Pada bab III halaman 107, tabel 19 realisasi anggaran per sasaran dan indikator **telah** menyajikan akuntabilitas keuangan dan perbandingan pagu dan realisasi berdasarkan program yang mendukung tercapainya sasaran namun belum seluruh program disajikan sesuai sasaran pada RKPD. (Lampiran.2)
25. Laporan kinerja **telah** menyajikan data target RPJMD tahun 2021-2026,
26. Laporan Kinerja **telah** menampilkan data penting Instansi Pemerintah (IP), LKjIP telah memuat sasaran yang sesuai dengan RPJMD, RKPD, Perjanjian kinerja dan Indikator Kinerja Utama.

27. Laporan Kinerja **telah** disajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;
28. Laporan Kinerja **telah** menyajikan upaya perbaikan ke depan, namun masih terdapat upaya perbaikan kedepan yang telah dilaksanakan yaitu melakukan revisi atau perubahan terhadap RPJMD/ Renstra perangkat daerah dan menyesuaikan indikator kinerja utama (sasaran dan indikator) pada target kinerja organisasi yang ingin dicapai.

B. Pengujian Atas Mekanisme Penyusunan

1. Laporan Kinerja IP **telah** disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu yaitu bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda
2. Laporan Kinerja **belum** seluruhnya menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah (IP) yang memadai, masih terdapat kekurangan penyajian dalam capaian kinerja yang terdiri dari:
 1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya belum disajikan secara detail bagaimana capaian keuangan dan capaian kinerja yang dibandingkan.
 2. Belum seluruh indikator menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan (Lampiran 3)
 3. Realisasi pada sasaran meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal tidak didukung dengan data pendukung
 4. Terdapat realisasi yang belum sesuai dengan data dukung (Lampiran 4) yaitu pada sasaran :
 - a) Meningkatnya pembangunan sektor tersier
 - b) Meningkatnya jumlah dan nilai investasi
 - c) Meningkatnya kemandirian daerah
 - d) Meningkatnya kesejahteraan sosial
 - e) Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota
 - f) Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas
 - 5) Terdapat data dukung yang belum diformalkan oleh perangkat daerah penanggung jawab untuk sasaran:
 - a) Meningkatnya kewirausahaan baru
 - b) Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat
 - c) Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota

- d) Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas
- e) Meningkatnya kapasitas kota tangguh
- 3. Terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja
- 4. Tim monitoring evaluasi dan pelaporan **telah** melakukan pengukuran kinerja persemester dan tahunan
- 5. **Telah** dilakukan Evaluasi realisasi program kegiatan per triwulan menggunakan E-SAKIP
- 6. **Belum** seluruh OPD menyampaikan laporan kinerja pada aplikasi Esr.Menpan.go.id, sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 adalah :
 - 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 - 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 4. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 6. Dinas Lingkungan Hidup

C. Kesesuaian substansi dalam Laporan Kinerja

- 1. Terdapat ketidaksesuaian penjelasan sasaran pada Laporan Kinerja halaman 44 dengan halaman 98 pada sasaran 17 meningkatnya kapasitas kota tangguh.
- 2. Sasaran dalam Laporan Kinerja **telah** sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja;
- 3. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja **telah** sesuai dengan indikator Kinerja Utama;

VIII. REKOMENDASI

A. Memperbaiki Kesesuaian Format dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Memperbaiki data tabel dan data gambar dengan menyesuaikan halaman pada badan laporan kinerja dan menambahkan rincian data tabel yang belum disajikan
- 2. Memperbaiki kategori capaian sasaran pada penjelasan dan tabel 5 halaman 43-44 sasaran meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat dari kategori

cukup menjadi kategori baik, sehingga jumlah kategori baik menjadi 15, dan kategori cukup 2

3. Melakukan penyempurnaan redaksi dan penyajian data kinerja

B. Memperbaiki Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja dengan rincian :

1. Menambahkan data yang memadai terhadap Laporan Kinerja yang belum dilengkapi dengan data pendukung
2. Melakukan perhitungan kembali atas seluruh indikator dan menyajikan data perhitungan realisasi sesuai perhitungan dan data dukung yang sah dari Perangkat Daerah penanggung jawab
3. Laporan Kinerja (LKj) yang memuat analisis, penjelasan, Efisiensi sumber daya serta diunggah ke dalam website Pemerintah Kota Samarinda
4. Mendorong Perangkat Daerah yang belum menyampaikan laporan kinerja agar segera mengupload ke Aplikasi E-Sakip/ Esr.Menpan.go.id

X. TANGGAPAN

Terhadap catatan hasil revidi, tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kota Samarinda tahun 2024 menindaklanjuti dengan memberikan tanggapan pada tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Tim penyusun telah memperbaiki dan melakukan penyesuaian terhadap tampilan tabel dan gambar sesuai dengan uraian catatan hasil revidi
2. Kategori capaian sasaran telah diperbaiki
3. Penyajian data dan redaksi pada laporan kinerja telah disempurnakan
4. Menampilkan data dukung tambahan serta memperbaiki data dukung yang belum sesuai dengan realisasi capaian kinerja
5. Mendorong perangkat daerah untuk melakukan perhitungan kembali sebelum disampaikan kepada tim penyusun
6. Laporan Kinerja akan disampaikan kepada Diskominfo setelah selesai dilakukan revidi oleh APIP
5. Tim pelaporan kinerja terus mendorong perangkat daerah untuk segera mengunggah laporan kinerja sebelum batas waktu 31 Maret 2024

XI. APRESIASI

Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Samarinda Tahun 2023 menyampaikan terimakasih atas bantuan dan kerjasama dari Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Samarinda Tahun 2023 atas kesediannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan atas Reviu Laporan sKinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Samarinda Tahun 2023.

Demikian laporan ini dibuat dan disampaikan sebagai Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Samarinda Tahun 2023. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR,

Mas Andi Suprianto, SE
Pembina (IV/b)
NIP. 19640531 198603 1 001

SISTEMATIKA

SISTEMATIKA PELAPORAN	RINCIAN	PENJELASAN		HALAMAN	CATATAN
Kata pengantar				i	-
daftar isi				iii	terdapat ketidaksesuaian daftar isi dengan isi
daftar gambar				iv	terdapat ketidaksesuaian tabel dengan daftar tabel
BAB. I Pendahuluan				v	terdapat ketidaksesuaian gambar dengan daftar gambar
	LATAR BELAKANG		13 dasar hukum	2	-
	Bidang kewenangan		bidang kewenangan sesuai UU no 23 tahun 2014, 6 urusan pemerintahan wajib, 14	5	-
	Aspek strategik		laju pertumbuhan dan dominasi perekonomian yang di dominasi oleh sektor	6	luas wilayah kota samarinda belum sesuai RPJMD dan BPS,
	struktur organisasi		terdiri atas dinas, badan dan kecamatan dengan total 40 OPD, 10 kecamatan dan	7	-
	Sumber daya aparatur		pegawai laki laki 3.009, perempuan 4.277. total 7.287 tahun 2023	13	data tabel belum sesuai, jumlah pegawai tahun 2023 belum
	Isu strategis		1. Refirmasi bidokrasi pemerintahan dan penguatan SDM aparatur, pembangunan yang merata dan responsif gender, tojakan pertumbuhan penduduk sebagai dampak dari terbangunnay IKN (samarinda sebagai kota penyangga), peningkatan pengelolaan lingkungan untuk meredksi pemanasan global, stabilisasi ketahanan	14	isu strategis 10 judul masih menyambung, sesuaikan dengan judul yang tertera pada RPJMD.
BAB II Perencanaan Kinerja	Rrencana Strategik		RPJMD 5 tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, prohram dan kegiatan daerah	27	-
	Visi misi pemerintah kota		terwujudnya samarinda sebagai kota pusat peradaban , berlandaskan pada 3 hal	28	-
	Tujuan dan sasaran strategis		terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing, terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, menurunnya kemiskinan dan pengangguran, terciptanya	33	tujuan RPJMD, tujuan SDG's tabel dirapikan, sasaran strategis no. 15 perlu diperbaiki redaksi "antas menjadi
	arah kebijakan. Strategi dan prioritas utama		pembangunan infrastruktur, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi	37	arah kebijakan jenis huruf dirapikan dan disesuaikan
	Perjanjian kinerja tahun 2023		terdapat 17 sasaran	39	sasaran strategis 15 perlu perbaikan redaksi "antas menjadi antar"
BAB III Akuntabilitas Kinerja	A. Capaian Kinerja Organisasi			42	
	hasil pencapaian sasaran strategis		tabel 5 menyajikan 17 sasaran strategis dan 24 indikator kinerja	44	kesimpulan capaian kinerja kategori baik 15 dan cukup 2, sasaran 13 seharusnya bernilai Baik sesuai perhitungan hal 78
		sasaran 1		45	-
		sasaran 2		49	-
		sasaran 3		52	-
		sasaran 4		56	tabel 10 IPM berdasarkan jenis kelamin tahun 2019-2021, sesuaikan dengan data terbaru BPS, penjelasan tahun disesuaikan .
		sasaran 5		59	-
		sasaran 6		61	data realisasi pada tabel perlu dicek kembali karena tidak sesuai dengan data BPS 8,20 tahun 2023
		sasaran 7		64	-
		sasaran 8		66	-
		sasaran 9		68	data tidak sesuai dengan LRA pemkot dan perhitungan belum akurat
		sasaran 10		71	-
		sasaran 11		74	-
		sasaran 12		76	-
		sasaran 13		78	-
		sasaran 14		83	-

		sasaran 15	87	perhitungan indikator rasio aksesibilitas antar wilayah kota belum benar, data luas wilayah belum sesuai dengan RPJMD., panjang kota halaman 88 dengan data tabel masih tidak sinkron, jumlah sarana prasana sistem transportasi perhitungan belum sesuai pada halaman 90
		sasaran 16	92	luas kota samarinda disesuaikan dengan RPJMD dan lakukan perhitungan ulang, persentase pemukiman tertata nilai luas pemukiman tertata belum sesuai seharusnya 2.761,89 Ha, indeks kualitas lingkungan hidup halaman 95, target dan realisasi terbalik
		sasaran 17	98	indeks risiko bencana, tabel nilai IKD untuk dirapikan,
		1. target vs realisasi		
		2. realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir		
		3. realisasi kinerja s/d th ini vs RPJMD		
		4. realisasi kinerja vs standar nasional		
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan/ peningkatan/ penurunan kinerja serta solusi		
		6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan		
		B. Realisasi Anggaran		
		Realisasi anggaran sesuai dokumen PK	100	nilai perkembangan realisasi PAD hal 102 belum sesuai dengan data di LRA, data pendapatan transfer hal 102 belum sesuai dengan LRA, realisasi anggaran pada tabel 19 disesuaikan dengan program yang ada di RKPD untuk pagu dan realisasi yang akan disajikan (RPKPD IV 57-104 dan jenis huruf disesuaikan,
		C. Analisis efisiensi sumber daya	113	analisis efisiensi sumber daya dengan rata rata capaian 102,07 agar dirincikan per jenis sasaran dan indikator dan perhitungannya
BAB IV. Penutup		langkah perbaikan kedepan (cek lagi dan sesuaikan dengan target kinerja yang belum tercapai)	115	Revisi RPJMD sudah dilakukan, dan tahun depan tidak ada revisi sehingga langkah ini kurang relevan , jabarkan perbaikan kedepan terkait pencapaian target yang belum tercapai terutama yang dibawah 75%

DATA TABEL

No	Judul tabel	Daftar Isi	Isi LKJIP	keterangan	Uraian
1	Jumlah penduduk tahun 2023	7	7	sesuai	data tabel adalah laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2022, data tabel disesuaikan dengan data samarinda dalam angka tahun 2023 halaman 43 jumlah penduduk samarinda adalah 861.878
2	Data pegawai pemerintah kota samarinda tahun 2023	13	13	sesuai	keterangan data tabel masih data tabel 1, seharusnya 2. data pegawai berdasarkan data samarinda dalam angka tahun 2023 halaman 73 adalah laki-laki 2.694 dan perempuan 3.712 dengan total 6.406. data yang disajikan di Lakiip masih data tahun 2022
3	kelelarasan RPJMD dengan SDG'S	34	34	sesuai	sesuai
4	perjanjian kinerja kota samarinda tahun 2023	39	39	sesuai	sesuai
5	hasil pencapaian sasaran strategis tahun 2023	43	43	sesuai	sesuai
6	umur harapan hidup/ kota di provinsi Kalimantan timur	45	45	sesuai	
7	harapan lama sekolah kab/ kota di provinsi Kalimantan timur	49	50	tidak sesuai	hal. 50
8	rata lama-lama sekolah kab/ kota di provinsi Kalimantan timur	50	50	sesuai	sesuai
9	perhitungan domain dan indikator indeks pembangunan pembangunan pemuda	54	55	tidak sesuai	hala 55
10	IPM berdasarkan jenis kelamin	57	57	sesuai	sesuai
11	bobot penilaian indeks pembangunan kebudayaan	59	60	tidak sesuai	hal 60
12	persentase kontribusi PDRB menurut lapangan usaha	62	63	tidak sesuai	hal. 63
13	jumlah UMK kota samarinda tahun 2023	64	65	tidak sesuai	hal 65
14	rekapitulasi target dan capaian pencapaian daerah kota samarinda	68	70	tidak sesuai	hal 70
15	tingkat pengangguran terbuka	73	77	tidak sesuai	hal 77
16	data evaluasi kinerja pelayanan publik 2023	75	79	tidak sesuai	hal 79
17	jumlah sapras sistem transportasi	80	-	tidak ditemukan tabel	tidak ada data tabel di hal. 80
18	rekapitulasi penanganan banjir kota samarinda	100	100	sesuai	data penanganan banjir
20	efisiensi penggunaan anggaran pemerintah kota	104	113	tidak sesuai	hal 113
21	tabel Indeks SPBE	-	81	belum tersaji di daftar tabel	

DATA GAMBAR

No	Judul tabel	Daftar Isi	Isi LKJIP	keterangan	Uraian
1	Skema keterkaitan visi, misi, agenda prioritas dengan tujuan dan sasaran	23	35	tidak sesuai	-
2	fokus RKPD sesuai RPJMD 2021-2025 per tahun	26	38	tidak sesuai	-
3	poster program doctor on call	47	47	sesuai	-

REALISASI ANGGARAN PER SASARAN DAN PROGRAM PRIORITAS

NO	Sasaran Strategis	Program berdasarkan RKPD	Program berdasarkan data LAKIP	Pagu	Realisasi	% Capaian	URUSAN	URUSAN
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat masyarakat	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 450.969.895.655	Rp 402.744.326.796	89,31	Dinas Kesehatan	Belum sesuai
		program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan					
		program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman					
		program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					
		program pengendalian penduduk	program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/ kota					
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	program pembinaan keluarga berencana (KB)	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 298.670.185.177	Rp 290.260.269.575	97,18	Dinas Pengendalian penduduk dan KB	Belum sesuai
		program pengelolaan pendidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan					
		program pendidik dan tenaga kependidikan						
		program pengembangan kurikulum						
		program pembinaan perpustakaan						
3	Meningkatnya prestasi Pemuda dan olahraga	program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	program pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi RAD kab/kota	Rp 88.405.247.117	Rp 82.980.702.661	93,86	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Belum sesuai
		program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan						
		program pengembangan kapasitas sumber daya saing kepemudaan						
		program pengembangan kapasitas kepramukaan						
		program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Program pengarusutamaan gender					
4	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	program peningkatan kualitas keluarga		Rp 9.284.875.368	Rp 8.836.149.624	95,17	Dinas Pemuda, olahraga dan pariwisata	Belum sesuai
		program pengelolaan sistem data gender dan anak						
		program perlindungan perempuan						
		program pemenuhan hak anak (Pha)						
		program perlindungan khusus anak						
5	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	program pengembangan budaya kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan	Rp 1.884.000.000	Rp 1.816.082.292	96,40	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum sesuai
		program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya						

		program pengelolaan permuseuman					Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Belum sesuai
		program pengembangan kesenian tradisional						
		program pembinaan sejarah						
6	Meningkatnya pembangunan sektor tersier	program perencanaan dan pembangunan industri					dinas Koperasi, UMKM dan perindustrian	
		program pengendalian izin usaha industri						
		program pengelolaan sistem industri nasional						
		program perjanjian dan pendaftaran perusahaan	Rp	2.239.667.555	Rp	2.108.678.076	Dinas perdagangan	
		program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang bernilai tinggi						
		program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Rp	77.653.323.116	Rp	72.667.935.833		
		program standarisasi dan perlindungan konsumen						
		program peningkatan sarana distribusi perdagangan						
		program pengembangan ekspor						
		program pemasaran pariwisata					Dinas Pemuda, olahraga dan pariwisata	
		program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif						
		program peningkatan daya tarik destinasi wisata						
7	Meningkatnya kewirausahaan baru	program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Rp	19.362.261.600	Rp	17.362.261.600		
		program pengawasan dan pemeriksaan koperasi						
		program penilaian kesehatan KSP/ USP koperasi						
		program pendidikan dan latihan perkoperasian					Dinas Koperasi, UMKM dan perindutrian	
		program pemberdayahaah dan perlindungan koperasi						
		program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)						
		program pengembangan UMKM						
8	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	program pengembangan iklim penanaman modal	Rp	32.161.053.539	Rp	26.745.451.987		
		program promosi penanaman modal						
		program pengendalian pelaksanaan penanaman modal					DPMP TSP	
		program pelayanan penanaman modal						
		program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal						
9	Meningkatnya kemandirian kawasan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	67.671.752.452	Rp	51.216.663.260	Badan Pendapatan Daerah	
10	Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan			Rp	37.011.844.391		
		program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Rp	46.058.387.390			Dinas Ketahanan pangan	

		program penanganan kerawanan pangan							Pangan	Belum sesuai
		program pengawasan keamanan pangan								
		program pengelolaan perikanan tangkap								
		program pengelolaan perikanan budidaya							Dinas perikanan	
		program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan								
		program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan								
		program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian							dinas pertanian	
		program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian								
		program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner								
		persenlase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian							dinas ketahanan pangan dan pertanian	
		program perijinan usaha pertanian								
		program penyuluhan pertanian								
11	Meningkatnya kesejahteraan sosial	program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	-	tidak ada	tidak ada			0,00	Dinas Pengendalian penduduk dan KB	Belum sesuai
		program pemberdayaan sosial								
		program pemberdayaan sosial							dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat	
		program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan								
		program rehabilitasi sosial								
		program perlindungan dan jaminan sosial								
12	Meningkatnya lapangan pekerjaan	program perencanaan tenaga kerja	sub kegiatan perluasan kesempatan kerja	Rp	12.114.448.508	Rp	10.966.410.017	90,52	Dinas Tenaga Kerja	Belum sesuai
		program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja								
		program penempatan tenaga kerja								
		program hubunga industrial								
13	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	program penunjang urusan pemerintah daerah	program penataan organisasi	Rp	511.948.000	Rp	334.851.780	65,41	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)/ semua OPD	
		program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	program pengembangan aplikasi informatika	Rp	47.116.015.924	Rp	44.597.698.924	94,66		
		program pengelolaan aplikasi informatika							dinas kominfo	
		program penyelenggaraan statistik sektoral								
		program penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi								
		program pendaftaran penduduk								

14	Meningkatnya pelayanan yang akuntabel	program pencatatan sipil					dinas kependudukan dan pencatatan sipil	Belum sesuai
		program pengelolaan informasi administrasi kependudukan						
		program pengelolaan profil kependudukan						
		program pengelolaan tanah kosong						
		program pengelolaan izin lokasi					Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang pertanahan	
		program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan						
		program pengelolaan izin membuka tanah '						
		program pengelolaan arsip						
		program perlindungan dan penyelamatan arsip					Dinas perpustakaan dan kearsipan arsip	
		program perizinan penggunaan arsip						
		program administrasi umum	kegiatan penataan organisasi		Rp 552.636.000	Rp 486.181.126	87,97	Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)
		program pengelolaan keuangan	program pengembangan sumber daya manusia		Rp 35.351.812.025	Rp 30.041.471.071	84,98	BPKAD
		program pengelolaan barang milik daerah						
		program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi						ITDA
		program administrasi pemerintahan desa/ kelurahan						Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat
		program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah						Bappeda litbang
		program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah						
		program penelitian dan pengembangan daerah						Kecamatan
		program pemberdayaan desa dan kelurahan						BKPSDM
		program kepegawaian daerah						
		program pengembangan sumber daya manusia						Itda
		program penyelenggaraan penagawasan						Selwan
		program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD						satpol pp
		program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum						
		program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan						

	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika sara budaya politik									kesbang	
	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan										
	program pembinaan dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya										
	program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial										
	Program Penyelenggaraan Jalan					Rp	122.175.128.690	Rp	116.383.817.851	Dinas PUPR	95,26
15	Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota	program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	program pembangunan system transportasi masal modern dan ramah lingkungan						Dinas Perhubungan	
		program pengelolaan pelayaran									
		program pengelolaan perkeretaapian									
16	Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas	program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)			Rp	96.073.603.901	Rp	90.336.375.335		94,77
		program penyelenggaraan penataan ruang									
		program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum									
		program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah									
		program pengembangan perumahan									
		program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum								Dinas Lingkungan Hidup	
		program pengelolaan persampahan		program pengawasan permukiman		Rp	99.294.307.415	Rp	88.346.501.090		94,77
		program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional									
		program pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah limbah bahan berbahaya dan beracun lingkungan dan izin eprilindungan dan pengelolaan lingkungan hidup									
		program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran									
		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Rp	96.073.603.901	Rp	90.336.375.335		94,77
17	meningkatkan kapasitas kota tangguh	program penanggulangan bencana		Program penanggulangan bencana		Rp	18.735.887.847	Rp	16.988.853.561	Dinas Perumahan dan Permukiman	94,77
		program pengelolaan sumber daya air (SDA)		program pengelolaan sumber daya air (SDA)		Rp	1.707.945.374.788	Rp	1.619.974.710.276	Dinas Perumahan dan Permukiman	
		program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase		program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase						Dinas Perumahan dan Permukiman	94,77

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

NO	Sasaran LAKIP	Indikator	Realisasi Target	Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target	Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan RPJMD	Perbandingan dengan provinsi/ kota lain/ nasional	faktor keberhasilan	faktor penghambat	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan	Keterangan
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup	ada	ada	ada	data umur angka harapan hidup dengan daerah lain di kalim	ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Dukungan layanan kesehatan, pendidikan serta pendapatan per kapita kota samarinda yang semakin baik	tercapai 99,87	analisis berupa nilai global, belum ada penjelasan terinci / perbandingan realisasi anggaran dengan fisik per masing masing indikator	1 program pendukung yakni pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, namun belum terdapat rincian realisasi biaya atas program yang berhasil dan persentase nya dari keseluruhan anggaran. pagu 450.969.895.655, realisasi anggaran 390.220.733.103/ dan adanya program doktor oncall	analisis efisiensi penggunaan sumber daya belum rinci
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka harapan lama sekolah	ada	ada	ada	data harapan lama sekolah menyajikan perbandingan dengan kota lain	peningkatan akses dan mutu pendidikan serta meningkatkan minat baca anak	tercapai lebih dari 100 %		program bantuan peralatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun dengan proses pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana	analisis efisiensi penggunaan sumber daya belum rinci
3	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	indeks pembangunan pemuda	ada	ada	ada	terdapat perbandingan dengan provinsi dan Indonesia	faktor pendukung belum dijabarkan, hanya menyebutkan berada diatas rata rata nasional tapi tidak dijelaskan secara spesifik	faktor penghambat ada 1 yaitu kondisi induk organisasi pemuda yg masih menjadi dualisme kepemimpinan, belum adanya pemilahan data		program yang menunjang belum dijabarkan	analisis efisiensi penggunaan sumber daya belum rinci
4	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	IPG	ada	ada	ada	data rata rata lama sekolah menyajikan perbandingan dengan kota lain	tersedianya regulasi terkait pengarusutamaan gender berupa perwali, serta program/ kegiatan perangkat daerah yang telah dianalisis GAP/ GBS/ KAK.	terdapat 7 kendala yaitu belum memiliki tim auditor UPG, adanya mutasi, pensiun dan petugas pindah tugas, belu memiliki dokumen RAD PUG, pelatihan auditor dan fasilitator, penyusunan dokumme RAD, bintek tim driver, pengembangan sistem penganggaran yang responsif gender secara online di BPKAD/ bapeda, belum maksimal koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program lintas sektor, kurangnya jumlah SDm terlatih PUG/ PPRG		program dalam pelaksanaan kegiatan belum dijabarkan	analisis efisiensi penggunaan sumber daya belum rinci
5	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	indeks pembangunan kebudayaan	ada	ada	ada	belum ada data pendukung	meningkatkan kemirtraan pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengapresiasi kebudayaan daerah serta terus menggali potensi budaya.	data kebudayaan seperti cagar budaya, lembaga adat, kesenian dan tradisi yang jarang terburukan. Lelak demogras kalim membuat kebudayaan belum terjangkau eksplorasi kebudayaannya secara keseluruhan.		program pengembangan kebudayaan sub kegiatan perlindungan , pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan, program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	belum ada data pendukung atas capaian kinerja
6	Meningkatnya pembangunan sektor tersier	persentase pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB	ada	ada	ada	Tidak ada data perbandingan provinsi/ daerah lain	pembangunan, revitalisasi, pemeliharaan, perencanaan, fasilitasi dan pengawasan terhadap pasar milik pemerintah, perusahaan, pemantauan/ sidak harga dan stok barang kebutuhan pokok, fasilitasi dan promosi produk pada calon maupun pelaku usaha ekspor, tera dan tera ulang serta pengawasan terhadap UTTP dan BDKT, pembinaan, promosi dan fasilitasi terhadap UMKM dalam pemasaran produk yang dihasilkan.	anggaran terbatas sehingga kegiatan pembinaan, sosialisasi, pengawasan, fasilitasi dan promosi produk pada pelaku usaha dalam pasar dan pelaku usaha diluar pasara tidak maksimal, kurangnya pengetahuan pelaku usaha untuk memahami peraturan, kurangnya SDm dan mobil operasional metrologi sehingga pelayanan tera kurang maksimal, kurangnya tenaga keamanan dan kebersihan di pasar yang dikelola pemerintah	program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program perijinan dan pendaftaran perusahaan, program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, program pengembangan ekspor, program standarisasi dan perlindungan konsumen, program pengembangan dan pemasaran produk dalam negeri	data yang disajikan masih 2022, nilai 6,82, seharusnya nilainya adalah 8,20 sesuai data BPS. Analisis efisiensi sumber daya belum rinci	

7	Meningkatnya Kewirausahaan baru	jumlah peningkatan kewirausahaan baru	ada	ada	ada	Tidak ada data perbandingan dengan provinsi/ daerah lain	-	pandemi covid yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan pelatihan menunggu level PPKM menurun (tahun 2023 sudah tidak ada level PPKM, apakah masih relevan sebagai faktor penghambat tahun 2023)	
8	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	jumlah nilai investasi	ada	ada	ada	Tidak ada data perbandingan dengan provinsi/ daerah lain,	iklim usaha pasca pandemi semakin membaik sehingga aktivitas kegiatan penanaman modal para pelaku usaha dikota samarinda pun berangsur pulih, terlaksananya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang tata cara pengisian laporan kegiatan penanaman modal online ke berbagai pelaku usaha dikota samarinda, aktif dalam pemberian informasi produk hukum berupa perda dan perwali dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendorong penerimaan pendapatan asli daerah guna memaksimalkan penerimaan daerah, adanya kemudahan dalam pelayanan transaksi pajak daerah, adanya UPT pendapatand aerah diselap kecamatan, adanya koordinasi yang sinergis antar perangkat daerah, adanya inovasi pengembangan sistem pemungutan pajak daerah, adanya pengawasan pemeriksa terhadap wajib pajak	mash kurangnya sanksi yang tegas dan mengikat ke pelaku usaha apabila lalai dalam penyampaian LKPM sehingga tidak sedikit pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM secara periodik, tidak adanya peraturan di aerah yang memberikan kewenangan untuk pemberian sanksi masih kurangnya kesadaran, kepatuhan dan kepatutan wajib pajak dalam hal pelaporan dan membayar pajak, data yang belum mutakhir, keterbatasan anggaran untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah, volume pekerjaan yang meningkat dan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada belanja langsung, khususnya kegiatan yang dianggarkan pada APBD perubahan, sehingga penyerapan anggaran tidak terserap maksimal	
9	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	persentase PAD terhadap pendapatan daerah	ada	ada	ada	Tidak ada data perbandingan dengan provinsi/ daerah lain	ada	program pengelolaan pendapatan	efisiensi sumber daya belum rinci
10	Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	Indeks ketahanan pangan	ada	ada	ada	Tidak ada data perbandingan dengan provinsi/ daerah lain,	belum menyajikan faktor keberhasilan	program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kelautan dan kemandirian pangan/ kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/ kota, sub kegiatan peyusunan rencan dan peta jalan kebutuhan infratraktur pendukung kemandirian panhan serta program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat/ kegiatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/ kota, sub kegiatan pengadaan cadangan pangan kab/ kota	belum menyajikan faktor keberhasilan/ penghambat, efisiensi sumber daya belum rinci
11	Meningkatnya kesejahteraan sosial	PDRB perkapita harga konstan	ada	ada	ada	Tidak ada data perbandingan dengan provinsi/ daerah lain,	peningkatan kualitas masyarakat golongan miskin penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pembinaan pendidikan dan pelatihan keterampilan	tidak terdapat penjelasan program pendukung	tidak terdapat penjelasan program pendukung/ efisiensi sumber daya belum rinci
12	Meningkatnya lapangan pekerjaan	tingkat pengangguran terbuka	ada	ada	ada	Tidak ada data perbandingan dengan provinsi/ daerah lain,	turunnya tingkat pandemi covid 19 serta naiknya harga barang pokok penting sehingga meningkatkan gairah sektor jasa dan perdagangan, meningkatkan kualitas kapasitas penerapan sistem perlindungan tenaga kerja di perusahaan serta peningkatan kualitas dan produktifitas serta kesempatan kerja	tidak terdapat penjelasan program pendukung	tidak terdapat penjelasan program pendukung/ efisiensi sumber daya belum rinci

program pengembangan umkm guna meningkatkan serta mensukseskan jumlah kewirausahaan baru	atas hambatan, tidak disajikan alternatif perbaikan kedepan yang akan dilakukan
tidak terdapat penjelasan program pendukung	tidak terdapat penjelasan program pendukung, efisiensi sumber daya belum rinci
program pengelolaan pendapatan	efisiensi sumber daya belum rinci
program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kelautan dan kemandirian pangan/ kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/ kota, sub kegiatan peyusunan rencan dan peta jalan kebutuhan infratraktur pendukung kemandirian panhan serta program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat/ kegiatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/ kota, sub kegiatan pengadaan cadangan pangan kab/ kota	tidak terdapat penjelasan program pendukung/ efisiensi sumber daya belum rinci
tidak terdapat penjelasan program pendukung	tidak terdapat penjelasan program pendukung/ efisiensi sumber daya belum rinci

13	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks pelayanan publik	ada	ada	ada	Tidak ada data perbandingan dengan provinsi/ daerah lain,	pendampingan, penyelenggaraan pelayanan publik melalui peningkatan penyelenggaraan pelayannya publik yang lebih baik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan pencatatan sipil dan kualitas data kependudukan, meningkatkan layanan penanganan masalah perantahan melalui identifikasi tanah negara dan pelayanan pengadaan tanah untuk kepentingan publik dan penanganan sengketa pertanahan, peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah,	belum rampungnya peta proses bisnis secara keseluruhan, kelengkapan ata saat evaluasi penyelenggaraan pelayannya publik secara mandiri	tidak terdapat penjelasan program pendukung	tidak terdapat penjelasan program pendukung/ penghambat, efisiensi sumber daya belum rinci
		Indeks SPBE	ada	ada	ada	Tidak ada data perbandingan dengan provinsi/ daerah lain,	-	klemahan pada sub domain manajemen SPBE bahwa arsitektur dan peta rencana SPBE baru diselesaikan pada akhir tahun 2023 sehingga tidak bisa menjadi bukti dukung, belum adanya audit TIK yang dilaksanakan sesuai dengan tools/ kerta kerja yang disediakan oleh BRIN	tidak terdapat penjelasan program pendukung	tidak terdapat penjelasan program pendukung/ penghambat, efisiensi sumber daya belum rinci
14	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel	Nilai AKIP	ada	ada	ada	Tidak ada data perbandingan dengan provinsi/ daerah lain,	menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya	-	tidak terdapat penjelasan program pendukung	tidak terdapat penjelasan program pendukung/ penghambat, efisiensi sumber daya belum rinci
		Indeks penerapan sistem Merit	ada	ada	ada	Tidak ada data perbandingan dengan provinsi/ daerah lain,	melakukan langkah langkah penataan ataupun perbaikan aspek aspek yang terkait dengan pelaksanaan sistem merit sesuai dengan rekomendasi dari KASN		tidak terdapat penjelasan program pendukung	tidak terdapat penjelasan program pendukung/ penghambat, efisiensi sumber daya belum rinci
15	Meningkatkan aksesibilitas inter dan antas wilayah kota	rasio aksesibilitas antar wilayah kota	ada	ada	ada	Tidak ada data perbandingan dengan provinsi/ daerah lain,	belum menyajikan faktor keberhasilan	belum menyajikan faktor penghambat	tidak terdapat penjelasan program pendukung	tidak terdapat penjelasan program pendukung/ penghambat, efisiensi sumber daya belum rinci
		persentase ketersediaan	ada	ada	ada	Tidak ada data perbandingan dengan provinsi/ daerah lain,	kinerja yang efektif dengan SDM yang unggul dan memadai serta anggaran yang menurjang program prioritas walikota dalam penciptaan ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan masyarakat, sinergitas antar perangkat daerah, menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun, membangun lahan hijau baru, perluasan RTH melalui pembelian lahan, mengembangkan koridor ruang hijau kota, mengakuisisi RTH privat, menjadikan bagian RTH publik, peningkatan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting, menghijaukan bangunan, menyusun kebijakan hijau, memberdayakan komunitas hijau	belum menyajikan faktor penghambat	program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	efisiensi sumber daya belum rinci
16	Meningkatkan kota yang nyaman dan berkualitas	persentase tersedianya luasan RTH	ada	ada	ada	Tidak ada data perbandingan dengan provinsi/ daerah lain,	kinerja yang efektif dengan SDM yang unggul dan memadai serta anggaran yang menurjang program prioritas walikota dalam penciptaan ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan masyarakat, sinergitas antar perangkat daerah, menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun, membangun lahan hijau baru, perluasan RTH melalui pembelian lahan, mengembangkan koridor ruang hijau kota, mengakuisisi RTH privat, menjadikan bagian RTH publik, peningkatan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting, menghijaukan bangunan, menyusun kebijakan hijau, memberdayakan komunitas hijau	-	program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	efisiensi sumber daya belum rinci
		persentase pemukiman yang	ada	ada	ada	Tidak ada data perbandingan dengan provinsi/ daerah lain,	belum menyajikan faktor keberhasilan	belum menyajikan faktor penghambat	tidak terdapat penjelasan program pendukung	tidak terdapat faktor dan program

		Indeks kualitas lingkungan hidup	ada	ada	ada	Tidak ada data perbandingan dengan provinsi/ daerah lain,	masih kurangnya anggaran dalam hal pemantauan kualitas air, dengan udara (penambahan titik lokasi uji sampel), kurangnya SDM dalam pengawasan terhadap industri untuk meningkatkan penataan, belum optimalnya peran serta masyarakat dalam program pengendalian pencemaran lingkungan, perlu adanya kebijakan dan peraturan daerah dalam pengelolaan lingkungan , masih kurangnya penghijauan koridor kota, masih kurangnya anggaran rehabilitasi lahan dan restorasi di lahan kritis milik pemerintah kota samarinda, belum maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektoral dalam pengelolaan dan pengawasan lingkungan, meningkatnya aktivitas yang menghasilkan emisi pasca pandemi (transportasi, permukiman, perkantoran dan kegiatan/ usaha)	tidak terdapat penjelasan program pendukung	tidak terdapat penjelasan program pendukung/ penghambat, efisiensi sumber daya belum rinci
17	Meningkatnya kapasitas kota Tangguh	indeks resiko bencana	ada	ada	ada	telah menyajikan nilai IRB dengan daerah lain	penguatan faktor kelembagaan, peringatan dini, pendidika, mitigasi dan kesiapsiagaan.	tidak terdapat penjelasan program pendukung	tidak terdapat penjelasan program pendukung/ penghambat, efisiensi sumber daya belum rinci
		persentase kawasan banjir yang tertangani	ada	ada	ada		pembangunan, peningkatan, pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air	program pengelolaan sumber daya air dan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	efisiensi sumber daya belum rinci

PENCAPAIAN IKU 2023

No	Indikator	Target 2023 Berdasarkan IKU	Capaian 2022 Berdasarkan Uraian Capaian Kinerja	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap target 2026 (%)	formula perhitungan	Sumber data	OPD	Keterangan
				Target	Realisasi (LKJIP)	% Realisasi						
1	Umur harapan hidup	74,78	74,56	74,78	74,68	99,87	75,28	99,20	Ya	BPS	Dinas Kesehatan	Terdapat Data Pendukung
2	angka harapan lama sekolah	15,35	15,10	15,35	15,39	100,26	15,81	97,34	Ya	BPS	Dinas Pendidikan	Terdapat Data Pendukung
3	rata rata lama sekolah	10,75	10,71	10,75	10,93	101,67	10,93	100,00	Ya	BPS	Dinas Pendidikan	Terdapat Data Pendukung
4	indeks pembangunan pemuda	51	50,67	51	61,17	119,94	54	113,28	Ya	Indeks Pembangunan Pemuda Kota	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Terdapat Data Pendukung
5	IPG	89,44	89,27	89,44	89,75	100,35	89,47	100,31	Ya	BPS	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terdapat Data Pendukung
6	Indeks pembangunan kebudayaan	54	52,49	54	54,81	101,50	55,13	99,42	tidak ada	tidak ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak Terdapat Data Pendukung
7	persentase pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB	6,20	6,82	6,2	6,82	110,00	6,1	111,80	-	BPS	Dinas Perdagangan	Data dukung belum sesuai dengan nilai realisasi di LKJIP, nilai realisasi berdasarkan data dukung dari Dinas Perdagangan
8	jumlah peningkatan kewirausahaan baru	2.000	2.042	2.000	1581	79,05	2.000	79,05	Ya	Jumlah UMKM Kota Samarinda tahun 2023	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	Data pendukung masih berupa data excel, belum diformalkan oleh OPD
9	Jumlah nilai investasi	22,5 T	-	22,5	20,5	91,11	24	85,42	Ya	Press Release Realisasi Investasi Kota Samarinda 2023 (DPMPPTSP)	DPMPPTSP	Data dukung yang ada masih perlu dikonfirmasi terkait angka realisasi 20,50 T karena dalam data dukung belum menunjukkan angka realisasi
10	persentase PAD terhadap pendapatan daerah	23,29	20,16	23,29	21,16	90,85	22,55	93,84	Ya	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun 2023	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	-Terdapat Data Pendukung - dalam LKJIP belum menampilkan formula perhitungan untuk mendapatkan nilai realisasi
11	indeks ketahanan pangan	84,00	84,66	84	88,97	105,92	88,5	100,53	Ya	Buku Indeks Ketahanan Pangan 2023 dari Badan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Terdapat Data Pendukung
12	PDRB perkapita harga konstan	106.735,471,81	83,33 jt	106735471,8	53406330	50,04	134081976	39,83	-	Kota Samarinda Dalam Angka 2023 (BPS)	Kota Samarinda	Tidak ada formula perhitungan untuk mendapatkan realisasi
13	tingkat pengangguran terbuka indeks pelayanan publik	5,39	6,78	5,39	5,92	91,05	4,2	70,95	Ya	BPS	Dinas Tenaga Kerja	Terdapat Data Pendukung, di LKIP nilai 91,04 selisih 0,01

14	Indeks pelayanan publik	92	70,33	92	80,4	87,39	94	80,43	tidak ada	Laporan Pelaksanaan PEKPPP Pemkot Samarinda 2023	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Data Dukung Laporan Pelaksanaan PEKPPP belum diformalkan
15	indeks SPBE	2,5	2,44	2,5	3,14	125,60	2,7	116,30	tidak ada	Berdasarkan Keputusan MENPAN RB RI Nomor 13	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terdapat Data Pendukung
16	nilai AKIP	63,4	64,150	63,4	64,11	101,12	63,45	101,04	tidak ada	LHE AKIP 2023 dari Kemenpan RB	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Terdapat Data Pendukung
17	indeks penerapan sistem merit	275	-	275	262	95,27	366	71,58	tidak ada	Keputusan KASN No:285/KEP.KASN /C/XI/2023 TGL 30-11-2023	BKPSDM	Terdapat Data Pendukung
18	rasio aksesibilitas antar wilayah kota	0,990	-	0,99	1,002	98,80	10219	97,26	tidak ada	Data Rasio Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Data dukung berupa data rasio jalan belum diformalkan/ttd - nilai capaian kinerja tahun 2023 perlu dihitung kembali
19	persentase ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi	58,12	47,75	58,12	58,12	100,00	96,86	60,00	ada	Analisis pencapaian kinerja	Dinas Perhubungan	Data dukung terkait luas wilayah dan panjang jalan kota perlu diklarifikasi kembali ke OPD Pemangku
20	persentase tersedianya luasan RTH	0,53	0,51	0,53	0,843	159,06	3,53	23,88	ada	Data Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda Tahun 2023	Dinas Lingkungan Hidup	- Terdapat Data Dukung - data dukung luasan kota Samarinda perlu diklarifikasi kembali ke OPD jumlah realisasi jika dihitung sebesar 0,044
21	persentase pemukiman yang tertata	21,62	-	21,61	24,61	113,88	96,86	25,41	ada	Bidang Perumahan DPKP Tahun 2023	Dinas Perumahan dan Permukiman	- Terdapat Data Dukung - Data dukung terkait luas permukiman yang tertata perlu dikonfirmasi kembali ke OPD Data Dukung belum diformalkan/ttd, pada saat tahun 2023
22	indeks kualitas lingkungan hidup	58,76	50	58,76	59,9	101,94	59,74	100,27	tidak ada	Laporan IKA 2023, Laporan IKL dan Laporan IKU 2023	Dinas Lingkungan Hidup	- Terdapat Data Dukung - tidak ada perhitungan untuk mendapatkan realisasi 59,9 - narasi di LKJP halaman 95 untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup untuk target dan realisasi angkanya tertukar
23	Indeks risiko bencana	88,05	-	88,05	98,29	89,58	3,53	3,59	-	surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terdapat Data Dukung
24	persentase kawasan banjir yang tertangani	25,78	-	25,78	27,31	105,93	78,13	34,95	ada	Data Pengendalian Banjir Samarinda	Dinas PUPR	- Terdapat Data Dukung - Data Dukung belum diformalkan/ttd kadis PUPR